

Tiket KA Ekonomi akan Dijual Online

TIKET kereta api (KA) kelas ekonomi pada 2011 akan dijual dengan sistem *online* atau bisa dipesan dengan menelepon pusat pemesanan tiket (*call center*). Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Jonan, di Jakarta, kemarin.

Penjualan tiket secara *online* dan lewat *call center* dilakukan karena ada lonjakan penumpang kereta api kelas ekonomi. Tiket untuk penumpang kelas ekonomi biasanya dijual sesaat sebelum kereta diberangkatkan.

Sementara itu, untuk kelas bisnis dan eksekutif pembelian bisa dilakukan beberapa hari sebelum keberangkatan.

Ia menerangkan, setelah BUMN perkeretaapian itu mengoperasikan kereta api kelas ekonomi AC Bogowonto jurusan Senen-Kutoarjo, timbul inisiatif untuk menggunakan metode *online* dalam pemesanan tiket.

Adapun harga tiket yang ditetapkan untuk kereta tersebut Rp70 ribu per penumpang.

"Oleh karena itu, tahun depan tiket kereta kelas ekonomi harus sudah bisa dipesan secara *online*. Bahkan, 30 hari sebelumnya. Saya memang

inginkan kereta itu cukup dua kelas, yaitu eksekutif dan ekonomi AC," ujarnya.

Sebelumnya, Jonan mengaku sempat cemas jika tiket kereta api baru tersebut tidak laku. Hal itu karena adanya kesalahpahaman dalam masa sosialisasi yang terlalu pendek dengan waktu Lebaran.

"Jarak waktu sosialisasi tiket kereta dengan masa Lebaran terlalu berdekatan. Makanya ada ketakutan kereta ini tidak diketahui penumpang," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan jumlah penumpang untuk kereta api kelas ekonomi, Jonan mengatakan berfluktuasi selama tiga tahun terakhir.

Pada 2008 jumlahnya mencapai 139.713 penumpang, di 2009 naik menjadi 141.340. Namun, pada 2010, jumlahnya menurun menjadi 119.813 penumpang.

"Jumlah penumpang kereta api untuk kelas ekonomi dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Sehingga kami memutuskan untuk meluncurkan sistem layanan *online* pada 2011. Tujuannya, agar jumlah penumpang kelas ekonomi terus meningkat setiap tahunnya," pungkasnya. (Ant/E-5)



MUDIK BNI: Direktur Consumer and Ritel BNI Darmadi Sutanto berbincang dengan pemudik di Stasiun Gambir, Jakarta, kemarin. BNI menyediakan 12 gerbong kereta api eksekutif berkapasitas 450 kursi dengan tiga kota tujuan, yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Surakarta. Peserta Mudik BNI 2010 merupakan nasabah yang mendapatkan tiket ketika melakukan setoran atau penambahan saldo sebesar Rp10 juta berlaku kelipatan dengan saldo minimal Rp15 juta.

MIGINO F HADI

Industri Sawit Menahan Gempuran

Perkebunan dan industri sawit memberi penghidupan bagi 2,8 juta kepala keluarga Indonesia.

Marchelo

MASA depan industri kelapa sawit di Indonesia boleh jadi akan menemui banyak jalanan terjal. Industri yang punya sumbangan besar bagi perekonomian rakyat itu kini ibarat tengah berjuang menahan gempuran yang datang dari

berbagai sisi untuk mempertahankan eksistensinya.

Gempuran pertama datang dari rencana pemerintah melakukan moratorium hutan. Upaya pemerintah dalam rangka mengurangi emisi ini dikhawatirkan akan berimbas pada penurunan pertumbuhan industri sawit karena berpotensi menghambat ekspansi perkebunan.

Suka tidak suka, potensi penurunan pertumbuhan industri sawit akibat moratorium itu kini telah menjadi keemasan bersama di kalangan pengusaha dan petani kelapa sawit. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, perke-

bunan dan industri kelapa sawit mampu memberikan penghidupan bagi sekitar 2,8 juta kepala keluarga di Indonesia.

"Ada 2,8 juta kepala keluarga yang bergantung pada sawit. Sekitar 1,6 juta bekerja di industri sawit. Sekitar 1,2 juta bekerja sebagai petani sawit, baik plasma maupun swadaya," ujarnya pada diskusi Moratorium Hutan dan Masa Depan Industri Sawit Nasional di Jakarta, pekan lalu.

Bahkan 40% dari total perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan perkebunan rakyat.

Dengan begitu, menurut Joko, keputusan pemerintah untuk melakukan moratorium



Kita harus memberi dukungan terhadap industri kita."

Hatta Rajasa

Menteri Koordinator bidang Perekonomian

hutan akan mengganggu perekonomian rakyat.

Pernyataan yang lebih keras disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Menurutnya, pemerintah sok menjadi pahlawan lingkungan

dengan melakukan moratorium hutan di saat harus menyelesaikan masalah-masalah lain yang lebih penting, seperti pemberantasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

"Apakah kita sudah cukup siap? Apakah kita sudah kaya? Apakah kita yang merusak? Kok, tiba-tiba kita menjadi pahlawan lingkungan yang sebenarnya merugikan kita sendiri," tutur Sofjan.

Menurutnya, moratorium hutan justru akan membuat industri kelapa sawit dalam negeri menjadi terhambat. "Padahal, semestinya penyelesaian masalah lingkungan bukan menjadi prioritas negara berkembang, melainkan negara maju," ujarnya.

Larangan produk CPO

Hantaman terhadap industri ini tak berhenti sampai di situ. Kali ini datang dari sejumlah perusahaan asing yang melarang anak usaha mereka di Indonesia membeli minyak kelapa sawit (*crude palm oil*/CPO) dari perusahaan Indonesia dengan tuduhan merusak hutan hujan.

Terakhir, Burger King Holdings Inc, menyusul Unilever dan Nestle, membatalkan kontrak dengan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) karena, menurut mereka, SMART tidak menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

Saat menanggapi hal itu, Menteri Koordinator bidang

Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah akan tetap mendukung industri CPO dalam negeri. "Kita harus memberi dukungan terhadap industri kita yang tidak melakukan apa yang disampaikan itu (kerusakan lingkungan)," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Hatta berharap pengambilan keputusan melarang menggunakan produk industri CPO asal Indonesia tidak dilakukan secara sepihak. Mestinya harus ada pendapat dari konsultan independen untuk memberikan rekomendasi tersebut. "Kita tidak ingin diperlakukan seperti ini, karena itu, harus dijelaskan." (Ant/E-3)

marchelo@mediaindonesia.com

SERUNYA LEBARAN DI WATER BOOM LIPO CIKARANG

Saksikan atraksi Rampak Bedug dan Marawis

13 - 14 September 2010

Jl. Madiun Kav. 115 - Lippo Cikarang | VIP +62 21 8990 7814
www.waterboomlippocikarang.com

LIPPO GROUP

Harga Terigu Naik lagi Usai Lebaran

ASOSIASI Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) memperkirakan harga terigu akan naik secara bertahap setelah Lebaran, menyusul harga bahan baku gandum yang terus meningkat.

Direktur Eksekutif Aptindo Ratna Sari Loppies, di Jakarta, Selasa (7/9) malam, menjelaskan harga gandum mengalami kenaikan pada Agustus, menyusul turunnya produksi dan stok akibat gagal panen di sejumlah negara yang menjadi sentra produksi, seperti Rusia dan Ukraina.

Ia mengatakan pada akhir Agustus, harga gandum jenis keras (HRW) di pasar internasional telah mencapai US\$288 per ton, naik 39% dari setahun lalu. Dalam kurun waktu serupa, harga jenis lunak yang berprotein rendah naik sekitar 70% menjadi US\$275 per ton.

"Kenaikan (harga tepung terigu) pasti ada, tapi bertahap. Kami akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu," ujar Ratna tanpa merinci waktu dan besaran kenaikan harga tepung terigu.

Ia mengatakan, kenaikan

harga tepung terigu terutama terjadi pada terigu berprotein rendah yang biasa dipakai untuk industri biskuit, karena harga gandum lunak naik signifikan. Saat ini, imbuh Ratna, harga tepung terigu berprotein rendah telah naik dari Rp90.000 menjadi Rp115.000 per sak.

Sementara itu, tiga produsen tepung terigu nasional mende-sak menteri keuangan segera merealisasikan penerapan bea masuk antidumping (BMAD) tepung terigu asal Turki, setelah menteri perdagangan merekomendasikan hal itu akhir

tahun lalu. "Apa harus menunggu industri tepung terigu yang ada di dalam negeri mati dulu, baru kebijakan itu diterapkan," ujar Dirut Sriboga Ratu Raya, Alwin Arifin yang juga Sekjen Aptindo.

Adapun PT Sriboga Ratu Raya yang beroperasi di Semarang bersama PT Panganmas Inti Persada (Cilacap) dan PT Eastern Pearl (Makassar) mengajukan gugatan antidumping terhadap tepung terigu Turki sejak 2007, dengan BMAD sekitar 20%. (Ant/*E-4)

Pembatalan Penaikan Airport Tax Tunggu Putusan MA

TARIF *passenger service tax* atau biasa dikenal dengan *airport tax* Bandara Soekarno-Hatta diharuskan kembali ke posisi semula. PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara itu memberlakukan tarif *airport tax* yang baru kepada setiap penumpang tujuan domestik maupun internasional.

Pembatalan tarif *airport tax* yang baru mengacu kepada putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang diterbitkan pada Selasa (7/9).

Putusan itu sekaligus menguatkan putusan PN Jakarta Pusat No 154/PDT.G/2009/JKT.PST tanggal 14 September

2009. Dalam putusan itu, majelis hakim PT DKI Jakarta menyatakan penyesuaian tarif yang didasarkan pada surat Menteri Perhubungan (Menhub) dan Direksi Angkasa Pura II dibatalkan.

Sebelumnya, pascapenerbitan surat penyesuaian tarif yang dikeluarkan Direksi Angkasa Pura II, untuk penerbitan domestik tarif *airport tax* dinaikkan dari Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu per penumpang. Untuk penerbitan internasional naik dari Rp100 ribu menjadi Rp150 ribu.

Sementara itu, menanggapi putusan PT DKI Jakarta, pihak

Angkasa Pura II menyatakan akan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Saat ini, tim legal operator bandara itu tengah menyiapkan data dan fakta terkait hal tersebut.

"Kami menghormati putusan banding tersebut. Tapi kami ingin memanfaatkan kesempatan terakhir melalui kasasi kepada MA," ungkap Corporate Secretary Angkasa Pura Hari Cahyono saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, kenaikan *passenger service tax* yang diberlakukan sejak Maret 2009 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan operator kepada pengguna jasa bandara, seperti perawatan sarana dan

prasarana serta kebersihan bandara.

"Sebagai perusahaan negara, kami tidak pernah merasa melakukan pelanggaran hukum dengan menaikkan tarif itu. Karena digunakannya juga untuk *cost recovery* perawatan bandara yang manfaatnya juga untuk pelayanan pengguna," jelasnya.

Keputusan menaikkan tarif *passenger service tax*, paparnya, sudah melalui proses yang panjang. Ia mengklaim, kebijakan itu sudah melalui proses evaluasi dan audit dari sejumlah pihak terkait serta mempertimbangkan kenaikan biaya operasional bandara. (CS/E-5)